

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Simpulan tersebut merupakan intisari dari Bab IV berdasarkan pada rumusan masalah pada Bab I. Rumusan masalah yang diajukan yaitu “bagaimana dinamika yang terjadi pada Inggris dalam keanggotaannya dengan Uni Eropa dari mulai integrasinya hingga referendum Brexit 2016?”. Maka dengan demikian, peneliti pun menurukannya menjadi empat pertanyaan penelitian yaitu *pertama*, “apa yang melatarbelakangi integrasi Inggris ke Uni Eropa?” *Kedua*, “bagaimana proses integrasi Inggris ke Uni Eropa tahun 1973” *Ketiga* “bagaimana karakteristik Inggris ketika menjadi anggota Uni Eropa?” tahun 1973-2016?” *Keempat* “mengapa warga Inggris memilih Brexit pada referendum 2016?”.

5.1 Simpulan

Inggris berintegrasi dengan Uni Eropa dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Terutama melemahnya ekonomi Inggris pasca Perang Dunia II, akibat dari merdekanya negara-negara jajahan Inggris dan biaya pengamanan militer Inggris di Asia Tenggara saat memasuki Perang Dingin. Runtuhnya Imperium Inggris tersebut tentunya membuat Inggris berpikir bahwa Inggris sudah tidak bisa lagi mengandalkan ekonominya lewat penjajahan. Sehingga dalam era setelah Perang Dunia II Inggris membangun kerjasama dengan apa yang disebut “*three centre circles*”, yakni hubungan transatlantik dengan Amerika Serikat, negara-negara Persemakmuran, dan negara Eropa Barat. Namun konsentrasi utama Inggris adalah Amerika Serikat dan negara-negara Persemakmuran sedangkan Inggris melihat perekonomian Eropa Barat yang belum stabil.

Ketika negara-negara Eropa Barat sejak 1957 berintegrasi dalam kerjasama ekonomi untuk memulihkan kembali perekonomiannya, dalam suatu kerjasama *ECSC (European Coal and Steel Community)*, Inggris mulai tertarik untuk menjadi anggota. Hal ini karena ECSC (yang kemudian menjadi Masyarakat Ekonomi Eropa) mengalami kemajuan negara-negara anggotanya dalam bidang ekonomi, yang menganut perdagangan bebas, dimana tidak adanya biaya ekspor impor. MEE merupakan integrasi regionalisme yang dapat dibilang cukup sukses, dengan pertumbuhan ekspor 140% dibandingkan dengan Inggris yang pada kurun waktu 1953-1963 di bawah 40%. Pada masa Perang Dingin juga Inggris kehilangan pengaruhnya di dunia internasional, dan renggangnya hubungan dengan Amerika Serikat membuat Inggris mencari cara untuk kembali muncul di dunia internasional dengan bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa.

Proses integrasi Inggris menuju Uni Eropa bukan hal yang mudah. Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan pada tahun 1961 telah mengumumkan bahwa Inggris akan bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Namun proses tersebut terhambat karena hubungan Inggris dengan negara Eropa Barat lainnya seperti Jerman dan Perancis di masa lalu. Dalam penyesuaian kebijakan yang paling utama adalah masalah pertanian. Inggris bukan negara yang mengutamakan sektor pertanian dalam perekonomiannya yang berbeda dengan Perancis dan Jerman. Kemudian veto Presiden Perancis de Gaulle juga menjadi hambatan proses perundingan hingga ditunda dalam beberapa tahun. Hal ini karena ketidakpercayaan de Gaulle pada Inggris yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Perancis tidak menyetujui bergabungnya Inggris karena bayang-bayang AS yang ditakutkan akan menguasai MEE dikemudian hari. Setelah de

Gaulle tidak menjabat barulah proses perundingan keanggotaan kembali dilakukan.

Karakteristik Inggris terhadap Uni Eropa ditunjukkan ketika Inggris resmi bergabung dengan MEE pada tahun 1973, dengan segala kebijakan Edward Heath, Inggris masih terkesan memaksakan diri bergabung ke MEE (atau yang kemudian menjadi Uni Eropa). Hal tersebut karena penyesuaian-penyesuaian yang tertunda pada masa perundingan akan diselesaikan kemudian setelah menjadi anggota. Inilah yang kemudian di masa depan menjadikannya seperti bom waktu untuk Inggris yang tidak diketahui kapan akan meledak. Karena setelah Inggris bergabung hubungannya tidak berjalan mulus. Di awal keanggotaannya saja Perdana Menteri Harold Wilson dari Partai Buruh selanjutnya mengumumkan untuk membuat referendum mengenai keanggotaan Inggris. Hal ini karena Partai Buruh menganggap keanggotaan tidak akan membuat Inggris menjadi lebih baik sebaliknya akan mengancam kedaulatan nasional Inggris. Perbedaan pandangan mulai terjadi antar partai yakni Partai Konservatif dan Partai Buruh. Namun masyarakat dan parlemen masih berpihak kepada keanggotaan, tentu saja keanggotaan dipilih karena mereka tidak mau usaha untuk keanggotaan menjadi sia-sia. Perbedaan sudut pandang partai dan perdana menteri tersebut yang membentuk karakter Inggris selama menjadi anggota. Yakni mengarahkan kepada sikap skeptis dan pro-Eropa.

Pada awal kepemimpinan Margareth Thatcher (Partai Konservatif) masalah mengenai keanggotaan sudah dapat diredam. Namun beberapa tahun kemudian ketika Uni Eropa mencetuskan akan membuat sebuah kesatuan moneter dan finansial dalam bentuk kesatuan mata uang dan Bank Sentral Eropa, ketegangan mulai terjadi lagi. Margareth Thatcher tidak setuju akan hal tersebut. Kali ini beliau setuju pada pernyataan

Partai Buruh bahwa Uni Eropa sudah menyinggung kedaulatan nasional Inggris. Belum lagi masalah anggaran Inggris untuk Uni Eropa yang dirasa terlalu besar. Thatcher terus memperjuangkan hal tersebut hingga anggaran Inggris untuk Uni Eropa dapat diturunkan. Walaupun memang masih belum seperti yang diharapkan Inggris, namun dengan ‘terpaksa’ Thatcher harus menerimanya. Pandangan Inggris mengenai ME tidak seperti yang diharapkan bahwa ME merupakan sebuah pasar bebas yang akan menguntungkan perekonomian Inggris. Sedangkan ME lebih dari itu ia akan terus berkembang dalam integrasinya tidak hanya dalam ekonomi tetapi dalam politik bahkan sosial.

Perjanjian Maastricht menjadi sumbu perselisihan kembali Inggris dan Uni Eropa. Perjanjian tersebut merupakan tonggak dibentuknya suatu Uni Eropa, dengan penciptaan pasar tunggal, bank sentral, kesatuan kebijakan luar negeri dan pertahanan, penyatuan internal dan kebijakan legislatif. Tentunya Inggris yang dari awal tidak ingin kedaulatannya diganggu gugat tidak setuju dengan dibentuknya Uni Eropa. Hal ini menyebabkan pengaruh Inggris di Uni Eropa menurun. Oleh karena itu PM selanjutnya Tony Blair berusaha untuk agar Inggris diterima kembali oleh Uni Eropa. Walaupun tetap tujuan utamanya adalah untuk kepentingan Inggris. Dengan kebijakannya Blair dapat meredakan ketegangan antara Uni Eropa dan Inggris.

Keanggotaan Inggris dengan Uni Eropa dibidani oleh Partai Konservatif dibawah Machmillan dan Heath, yang kemudian ditentang oleh Buruh yakni Wilson. Namun kemudian Thatcher dan John Mayor (Konservatif) menjadi bersikap skeptis terhadap Uni Eropa, yang kembali diredam oleh Tony Blair dengan “*Back to Europe*”-nya. begitupun seterusnya hingga pemerintahan David Cameroon yang mencanangkan referendum, yang ia tidak sangka akan mengarah kepada Brexit.

Referendum Brexit tahun 2016 merupakan jawaban atas tumpukan permasalahan Inggris dan Uni Eropa. Referendum yang dilakukan pada tahun 2016 mengenai keanggotaan Inggris di Uni Eropa sebenarnya telah dicetuskan dalam kampanye David Cameron sejak 2014. Janjinya kepada masyarakat yang telah banyak mendengar isu-isu negatif atas keanggotaan Inggris dan Uni Eropa, adalah membuat referendum keanggotaan. Dukungan masyarakat terhadap Brexit dipelopori kaum Euroskeptis dari anggota partai atau anggota parlemen. Sehingga pada 23 Juni 2016 dengan hasil *voting* yang sangat tipis perbedaannya masyarakat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit). Namun David Cameron menyatakan pengunduran dirinya setelah hasil referendum keluar. Karena setelah menjadi perdana menteri ia merasa Inggris masih harus bersama-sama Uni Eropa.

Dinamika yang terjadi antara Inggris dan Uni Eropa dalam rentang tahun 1973 hingga 2016 membuat hal ini bukan suatu hal yang tidak disangka-sangka. Selain kepada masalah-masalah sejak awal integrasinya. Masalah imigran menjadi sorotan publik dan bahan kampanye kelompok Euroskeptis. Begitupun menyinggung masalah kedaulatan nasional, bahwa Uni Eropa terlalu ikut campur dalam kedaulatan nasional Inggris. Sehingga membuat Inggris tidak bisa memajukan diri untuk kepentingan nasionalnya sendiri. Hal-hal tersebut mendukung fenomena populisme yang sedang populer di negara demokrat Barat dimana bayang-bayang kejayaan masa lalu membuat mereka ingin memiliki kontrol atas negara mereka sendiri, dalam hal ini Inggris ingin melakukan urusan negaranya sendiri tanpa Uni Eropa.

5.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam mata pelajaran sejarah peminatan kelas II kurikulum 2013, terdapat Kompetensi Dasar (KD) nomor 3.1 yaitu mengevaluasi perkembangan dan dampak Perang Dingin terhadap kehidupan politik dan ekonomi global kemudian nomor 3.2 yaitu mengevaluasi sejarah organisasi global dan regional : GNB, ASEAN, OKI, APEC, OPEC, MEE, GATT, WTO, NAFTA dan CAFTA. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peserta didik, khususnya kondisi ekonomi global dan perkembangan organisasi MEE. Selanjutnya melalui penelitian ini peserta didik mampu mengetahui sejarah perkembangan MEE dan lebih luas lagi mengenai hubungannya dengan Inggris.
2. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai dinamika Inggris dan Uni Eropa dari integrasi hingga Brexit tersebut diharapkan dapat menambah khazanah sejarah Uni Eropa yang lebih khusus lagi mengenai hubungannya dengan Inggris, yang menjadi sebab terjadinya Brexit di tahun 2016.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah yang akan melakukan penelitian sejenis. Masih banyak hal yang perlu diperdalam mengenai dinamika Inggris dan Uni Eropa, khususnya dari tiap periode perdana menteri Inggris ataupun mengenai dampak Brexit setelah masa proses pemisahannya dengan Uni Eropa berakhir. Minimnya kajian-kajian tersebut dapat dijadikan peluang untuk melakukan penelitian yang lebih menarik mengenai Uni Eropa.